

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga menjadi salah satu satuan kerja yang berperan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN. Entitas berkedudukan di Jalan Airlangga No. 31 - 33, Surabaya, Jawa Timur.

Selain memiliki tugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur juga mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berkomitmen dengan visi **“menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Namun pada tahun 2021 mulai disinkronisasi menjadi SAKTI.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode yang berakhir pada 30 Desember 2023 telah mengacu pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan instansi dan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang dan penyisihan piutang sesuai PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP/ TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Penilaian Persediaan dengan metode FIFO (*First In First Out*). Persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Nilai Persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian; transfer keluar; hibah keluar; penyerahan kepada masyarakat/pemda; penggunaan barang pemeliharaan; pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; penyerahan dari belanja bantuan social (bansos); barang rusak/using; penghapusan lainnya; reklasifikasi keluar; koreksi keluar; serta penyesuaian hasil opname fisik dalam hal kuantitas berdasarkan opname fisik lebih kecil dibandingkan kuantitas berdasarkan pembukuan
- Seluruh transaksi persediaan harus dicatat secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi

- Pada saat barang keluar tidak dapat menentukan secara spesifik persediaan dengan harga satuan dan spesifikasi yang mana yang akan dikeluarkan. Untuk itu atas persediaan yang bersifat unik dan memerlukan pencatatan spesifik seperti barang persediaan dengan tujuan untuk diserahkan dengan spesifikasi yang berbeda-beda agar dilakukan pencatatan dengan menggunakan kode barang yang berbeda untuk menjaga validitas harga masing-masing barang. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP / TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.06/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain tata letak sirkuit terpadu, Peta RBI Skala Menengah (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000)	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan gol I	70
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku pertunjukan, produse fonogram	50
Hak Ciptaan Karya Seni Terapan, Perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak Ekonomi Lembaga penyiaran, Hak paten biasa, perlindungan varietas tanaman semusim, peta RBI skala kecil (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000)	20

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Capaian Output Strategis

Capaian output Strategis satker 018030 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Bulan Desember 2023 yang telah diunggah di aplikasi SPAN. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah mencapai progress capaian output 100 persen dengan realisasi volume keluaran sesuai dengan target. Adapun rincian daftar realisasi anggaran serta realisasi volume keluaran beserta progress capaian output sampai dengan Bulan Desember 2023 terlampir.

Selain capaian output yang terlampir, satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur juga telah mendapatkan beberapa pencapaian seperti Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan beberapa capaian lain seperti nilai IKPA baik serta inovasi-inovasi terkait aplikasi yang mempermudah dalam pekerjaan seperti aplikasi perjalanan dinas dengan nama pd.kbjatim, aplikasi surat.kbjatim serta presensi apel yang mulai dilakukan secara online untuk kemudahan pelaporan dan pengecekan kedisiplinan pegawai.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Lainnya
Rp.617.496.047

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 617.496.047. Pendapatan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari denda pekerjaan pemerintah dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		500,712,664	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		365,611	
Pendapatan Denda Peny Pekerjaan Pemerintah		18,426,720	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	97,991,052	-
Jumlah	-	617,496,047	-

Pendapatan dan pemindahtanganan BMN lainnya senilai Rp 46.666.666 merupakan hasil lelang 1 paket BMN berupa barang inventaris kantor dalam keadaan rusak berat dan senilai Rp 454.045.998 merupakan hasil lelang kendaraan bermotor berupa 5 mobil dan 1 bus. Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) senilai Rp 365.611 berasal dari penyeteroran akumulasi bunga dan pajak Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Tahun 2022 dan 2023. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp 18.426.720 berasal dari keterlambatan pengiriman pengadaan Andalan IUD Tcu 380A TA 2023 melalui E-katalog sesuai nomor kontrak 2000/KEU.801/J.1/2023 tanggal 8 Februari 2023. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp 97.991.052 merupakan akumulasi dari potongan melalui SPM terkait pengembalian tunjangan jabatan pegawai Bulan Mei 2022 s.d Maret 2023 senilai Rp 64.881.950. Potongan terkait SPM gaji terusan kenaikan gaji berkala PKB Bondowoso senilai Rp 158, a.n Nanang Sugianto senilai Rp 124 dan Rr. Ayu Mayliawati senilai Rp 38. Sedangkan sisanya merupakan setoran melalui billing terkait Pengembalian tunjangan anak dan beras Bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2022 a.n Erna Bintarti, S.Sos senilai Rp 10.711.066 dan

Partini Rp 11.227.292. Pengembalian kelebihan uang makan Bulan November 2022 a.n Lusiana Kusuma Trisna senilai Rp 597.550 dan Raditya Maarif senilai Rp 667.850. Pengembalian gaji pokok, tunjangan istri dan anak Bulan September 2019 s.d Desember 2022 a.n Drs. Djoko Setyono senilai Rp 8.516.704. Pengembalian Kelebihan Tunjangan Istri dan Tunjangan Beras a.n Hario Bimo Witjaksono, SE Periode Desember 2022 senilai Rp 547.270. Pengembalian Kelebihan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja periode Desember 2022 a.n Okky Setyawan, S.I.Kom senilai Rp 841.050.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pndptn dari Pemindahtanganan BMN	500,712,664	6,578,999	7510.77
Pndptn Sewa Tanah,Gedung&Bangunan	-	810,000	(100.00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	365,611		
Pndptn Denda Keterlambatan Peny.Pek.Pem	18,426,720	12,281,942	50.03
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	97,991,052	86,339,924	13.49
Jumlah	617,496,047	106,010,865	482.48

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 482.48 persen dibandingkan TA 2022 dikarenakan adanya kenaikan tertinggi pada pendapatan pemindahtanganan BMN yang berasal dari hasil lelang kendaraan bermotor. Selain itu terdapat kenaikan denda keterlambatan dari pengadaan IUD Tcu pada TA 2023.

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp. 493.626.888.062*

Realisasi Belanja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 493.626.888.062,- atau 99.28 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 497.205.071.000,-

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	263,898,461,000	262,628,869,205	99.52
Belanja Barang	233,053,940,000	230,779,822,241	99.02
Belanja Modal	252,670,000	251,937,265	99.71
Total Belanja Kotor	497,205,071,000	493,660,628,711	99.29
Pengembalian Belanja	-	33,740,649	-
Jumlah	497,205,071,000	493,626,888,062	99.28

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 12.52 persen disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran Belanja barang dan modal pada TA 2023 lebih besar dibanding TA 2022.
2. Realisasi Belanja barang dan modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 43.09 persen dibandingkan TA 2022

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	262,595,128,556	277,329,512,721	(5.31)
Belanja Barang	230,779,822,241	161,284,632,580	43.09
Belanja Modal	251,937,265	99,182,850	154.01
Jumlah	493,626,888,062	438,713,328,151	12.52

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp 262.595.128.556

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 262.595.128.556 dan Rp. 277.329.512.721. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 5.31 persen dari TA 2022 yang disebabkan oleh adanya pegawai yang purna tugas.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	REALISASI TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2022 (Rp)	Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	152,605,167,674	167,360,049,236	(8.82)
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Keg)	98,814,220,456	105,432,492,790	(6.28)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	6,928,588,115	3,050,330,160	127.14
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Keg) PPPK	4,280,892,960	1,795,129,574	138.47
Jumlah Belanja Kotor	262,628,869,205	277,638,001,760	(5.41)
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	33,740,649	308,489,039	(89.06)
Jumlah Belanja	262,595,128,556	277,329,512,721	(5.31)

Belanja Barang
Rp
230.779.822.241,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 230.779.822.241 dan Rp. 161.284.632.580. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 43.09 persen seiring dengan naiknya pagu anggaran dibandingkan TA 2022. Kenaikan belanja barang untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2023 ini dikarenakan naiknya belanja barang lainnya untuk diserahkan masyarakat berupa pengadaan alat kontrasepsi maupun non alkon untuk memenuhi permintaan OPDKB di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur serta digunakan saat pelayanan KB di berbagai daerah. Hal ini dikarenakan pada periode yang berakhir 30 Desember 2023 status pandemi telah dicabut sehingga kegiatan telah berjalan dengan normal demi pencapaian program.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	2,606,059,395	5,357,019,102	(51.35)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	37,371,270,415	46,686,835,583	(19.95)
Belanja Barang Persediaan (5218)	212,654,100	356,878,340	(40.41)
Belanja Jasa (5221)	42,854,463,365	36,108,915,506	18.68
Belanja Pemeliharaan (5231)	1,876,310,654	1,271,313,389	47.59
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	45,686,196,883	48,298,413,292	(5.41)
Belanja Brg Utk diserahkan kpd Masy.(5261)	-	21,191,500	
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (5263)	100,172,867,429	23,184,065,868	332.08
Jumlah Belanja Kotor	230,779,822,241	161,284,632,580	43.09
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	230,779,822,241	161,284,632,580	43.09

Belanja barang TA 2023 terdapat realisasi belanja barang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Belanja Barang dalam Rangka Covid-19 TA 2023

KODE	URAIAN	Realisasi 30 Sept 2023
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi	2,921,034
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	187,479,944
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	-
	Jumlah Belanja Kotor	190,400,978
	Pengembalian Belanja	-
	Jumlah Belanja	190,400,978

Adapun realisasi belanja barang dalam rangka covid-19 ini merupakan realisasi belanja sampai dengan semester I Tahun 2023.

Belanja Modal
Rp.251.937.265

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 251.937.265 dan Rp. 99.182.850. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 154.01 persen seiring dengan naiknya pagu anggaran belanja modal. Pada tahun 2023 terdapat pembelian alat rumah tangga berupa *air purifier*, *AC Split*, *PC unit*, alat studio berupa *microfon* dan komputer unit berupa *PC unit*, *laptop*, *Tablet PC*, *white board electric*, Televisi, *Amplifier*, *Bracket standing* peralatan dan *switcher*

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah (5311)	0	0	
Belanja Modal Peralatan & Mesin (5321)	251,937,265	99,182,850	154.01
Belanja Modal Gedung Bangunan (5331)			
Belanja Modal lainnya (5361)			-
Jumlah Belanja Kotor	251,937,265	99,182,850	154.01
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	251,937,265	99,182,850	154.01

B. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III dan IV dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

3. Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Pelaksanaannya di antaranya melalui dua puluh enam program/ kegiatan prioritas, yang tersebar di 38 Kabupaten/ Kota dengan pagu mencapai Rp 218.478.328.000 dan realisasi sebesar Rp 216.436.059.626 dengan rata-rata PCRO mencapai 100 persen. Adapun rincian terlampir setelah halaman ini.

4. Prioritas Nasional IV– Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Pelaksanaannya di antaranya melalui satu program prioritas berupa kegiatan prioritas “PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu” yang tersebar 38 Kabupaten/Kota atau 4116 Kelompok masyarakat dengan pagu mencapai Rp 3.012.887.000 dan realisasi sebesar Rp 2.994.604.280 atau 99.39%. Sedangkan pencapaian RO sudah mencapai 4116 Kelompok masyarakat dengan PCRO 100%

Adapun rincian terlampir sebagai berikut:

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER 2023 satker : 018030

PRO PN III

No	Nama Satker	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)			
					Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	S.d Bulan Ini	
										RVRO	PCRO (%)
1	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QDE001	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	7,885,606,000	7,742,724,787	98.19	1,474,500	Keluarga	1,474,500	100
2	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QDD002	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	2,100,000,000	2,080,739,624	99.08	1,360	Kelompok Masyarakat	1,360	100
3	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QDD005	Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan stunting	5,495,644,000	5,473,750,755	99.6	12,895	Kelompok Masyarakat	12,895	100
4	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QDC001	Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan stunting	1,304,000,000	1,301,886,050	99.84	302,093	Orang	306,923	100
5	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	UBA002	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	1,862,500,000	1,860,229,565	99.88	38	Daerah(Prov/ Kab/Kota)	38	100
6	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	UBA004	Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota	1,575,600,000	1,573,135,243	99.84	38	Kab/Kota	38	100
7	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QMB001	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	27,060,000,000	25,566,218,338	94.48	3	layanan	3	100
8	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	SCM001	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	28,154,637,000	28,131,834,490	99.92	93,809	Orang	94,712	100

9	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QDB001	Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI	805,111,000	761,282,000	94.56	2,166	Lembaga	2,166	100
10	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QMA001	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	17,202,247,000	17,198,242,530	99.98	1	layanan	1	100
11	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	PEA001	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6,379,990,000	6,333,467,699	99.27	39	kegiatan	39	100
12	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QEI001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	100,522,558,000	100,466,419,972	99.94	2,166	Lembaga	2,166	100
13	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	UBA005	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan	737,200,000	722,236,529	97.97	38	Kab/Kota	38	100
14	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	5297	PEA001	Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	1,865,990,000	1,795,831,260	96.24	1	kegiatan	1	100
15	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QDD006	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB	2,661,358,000	2,660,565,382	99.97	278	Kelompok Masyarakat	278	100
16	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	PEA002	Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota pada 12 Provinsi prioritas	1,881,000,000	1,841,963,506	97.92	38	kegiatan	38	100
17	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	UBA001	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	1,231,000,000	1,229,120,829	99.85	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100

18	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QMA002	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	381,805,000	375,505,500	98.35	1	layanan	1	100
19	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	PBG001	Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	150,000,000	149,394,000	99.6	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100
20	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QDD004	Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1,034,146,000	1,029,531,646	99.55	38	Kelompok Masyarakat	38	100
21	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	UBA003	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di Kampung KB pada 12 provinsi prioritas	926,800,000	922,871,456	99.58	38	Kab/Kota	38	100
22	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	5297	QAH001	Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	131,250,000	125,771,400	95.83	1	layanan	1	100
23	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	UAE001	Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	200,000,000	199,015,251	99.51	1	Laporan	1	100
24	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	5297	QIF001	Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	62,940,000	62,849,926	99.86	1	Layanan	1	100
25	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QMA003	verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi	2,935,711,000	2,924,799,901	99.63	1	layanan	1	100
26	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	SCM002	Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting	3,931,235,000	3,906,671,987	99.38	1,995	Orang	2,002	100
				JUMLAH	218,478,328,000	216,436,059,626					

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER 2023 satker : 018030

PRO PN IV

No	Nama Satker	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)			
					Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	S.d Bulan Ini	
										RVRO	PCRO (%)
1	PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	3331	QDD001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	3,012,887,000	2,994,604,280	99.39	4,116	KelompokM asyarakat	4116	100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp 9.655.435

Nilai Piutang Bukan Pajak pada TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.655.435 dan Rp. 21.938.358 . Adanya Piutang Bukan Pajak pada TA 2023 disebabkan oleh adanya jurnal umum terkait pengembalian tunjangan kinerja pegawai Bulan Desember 2023 a.n Isma Soetjahjo Rp 1.788.135, Aisyah Imaniyah Rp 1.191.015 dan Tri Sasongko senilai Rp 1.045.485 yang dibayarkan pada Januari 2024. Selain itu terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan promosi KIE program Bangga Kencana dan penurunan stunting bersama mitra kerja pada masyarakat khusus TA 2022 yang dibayar pada Januari 2024 senilai Rp 5.630.800.

C.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih
(Rp 48.277)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp 48.277) dan (Rp 109.692). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2023 ini berasal dari Piutang Bukan Pajak terkait Pengembalian tunjangan kinerja pegawai Bulan Desember 2023 dan pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan promosi KIE TA 2022 yang dibayarkan di 2024 .

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp 38.882.660.294

Nilai Persediaan TA 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 38.882.660.294 dan Rp. 9.235.609.959. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Jenis	2023	2022
Barang Konsumsi		23,953,553
Persediaan Lainnya utk dijual/diserahkan ke masy.	38,882,660,294	9,211,656,406
Jumlah	38,882,660,294	9,235,609,959

Terdapat beban persediaan usang senilai Rp 309.387.958 berupa 14.672 stera syringe 10cc senilai total Rp 12..838.000. Sebanyak 42.626 cagut chromic senilai total Rp 237.657.558 dan 38.950 syringe 5 cc senilai total Rp 58.892.400.

Terdapat saldo pendapatan penyesuaian nilai persediaan di neraca percobaan Rp 80.340.000 terkait koreksi jumlah masuk 20.000 pil progestin @4.017 dikarenakan adanya salah catat di sakti. Seharusnya SBBK tertulis pil progestin keluar hanya 12.000 tapi salah catat menjadi 32.000 sehingga harus dilakukan pengembalian saldo sejumlah 20.000.

Tanah
Rp 231.074.952.000

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 231.074.952.000 dan Rp. 231.074.952.000.

Aset berupa tanah terletak di:

1. Jl. Rejo Aman II, Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
2. Jl. Manukan Kulon Blok 15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
3. Jl. Raya Singosari No. 1, Kelurahan Losari, Kabupaten Malang;
4. Jl. Kalimantan No. 22, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Rincian saldo tanah TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Perolehan Awal Tanah

No.	KIB	Alamat	Luas	Nilai Perolehan Awal
1	2010101004	Jl. Rejo Aman II, Surabaya	700 m2	Rp 884.900.000,00
2	2010101004	Jl. Manukan Kulon Blok 15, Surabaya	195 m2	Rp 224.600.000,00
3	2010104001	Jl. Raya Singosari 1, Malang	2930 m2	Rp 2.388.000.000,00
4	2010104001	Jl. Kalimantan 22, Jember	8260 m2	Rp 6.622.085.000,00
Jumlah				Rp 10.119.585.000,00

Rincian Nilai Tanah Setelah Penilaian Kembali Aset Tanah

Alamat	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2021	Nilai 2022
Jl. Rejo Aman II, Surabaya	4,481,400,000	4,481,400,000		
Jl. Manukan Kulon Blok 15, Sby	2,295,930,000	2,295,930,000		
Jl. Raya Singosari 1, Malang	15,022,110,000	14,925,420,000		
Jl. Kalimantan 22,Jember	49,741,720,000	51,329,222,000		
Pembuatan Akta Notaril Tanah Perwakilan BKKBN Jawa Timur			98,000,000	
Pengurusan sertifikat tanah Perwakilan BKKBN Jawa Timur			197,000,000	
Revaluasi Tanah Perwakilan BKKBN Jawa Timur (Jalan Airlangga Surabaya)				109,264,900,000
Revaluasi tanah Balai Latbang (Jalan Kalibokor Surabaya)				48,483,080,000
Jumlah	71,541,160,000	73,031,972,000	73,326,972,000	157,747,980,000

Untuk sertifikat tanah dijelaskan sebagai berikut :

- Tanah seluas 700 m2 sebesar Rp. 884.900.000,00 beralamat di Jl. Rejo Aman II,Bendul Merisi, Wonocolo, Surabaya atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan sertifikat Nomor: 12.01.02.12.4.00001, tanggal penerbitan sertifikat 16-12-1996.
- Tanah seluas 195 m2 sebesar Rp. 224.600.000,00 beralamat di Manukan Kulon atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan sertifikat Nomor : 12.01.14.15.4.00043, tanggal penerbitan sertifikat 30-04-1993.
- Tanah seluas 2930 m2 sebesar Rp. 2.388.000.000,00 beralamat di Raya Singosari atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan sertifikat nomor : 12.30.21.44.0.00002, tanggal penerbitan sertifikat 07-08-2007.
- Tanah seluas 8260 m2 sebesar Rp. 6.622.085.000,00 beralamat di Jl. Kalimantan Jember atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan sertifikat nomor : 12.34.72.04.4.00046, tanggal penerbitan sertifikat 23-03-1990.

- Hasil penilaian kembali pada aset berupa 4 titik tanah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 61.421.575.000,-
- Hasil penilaian kembali pada aset berupa tanah di Malang dan Jember yaitu sebesar Rp 1.490.812.000,-
- Pembuatan akta notariil tanah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 98.000.000,-
- Pengurusan sertifikat tanah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 197.000.000,-
- Hasil penilaian kembali pada aset berupa tanah di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Jalan Airlangga dan Kalibokor Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 157.747.980.000,-

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp 14.603.554.894

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 adalah Rp. 14.603.554.894 dan Rp. 18.461.803.821. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	18,461,803,821
Mutasi tambah:	279,287,265
Mutasi kurang:	(4,137,536,192)
Saldo per 31 Desember 2023	14,603,554,894
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(12,632,588,480)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1,970,966,414

Mutasi tambah peralatan mesin berasal dari pembelian unit air purifier, AC Split, microfone, PC Unit untuk server, laptop, tablet PC, white board electric, Televisi, Amplifier, Bracket standing peralatan dan switcher, wireless access point, mini PC, kamera, voice recorder, sound system, LCD. Sedangkan mutasi kurang berasal dari penghapusan kendaraan bermotor berupa 2 mobil, 3 mobil penerangan dan 1 bus serta alat kantor, rumah tangga, studio dan alat komunikasi.

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp. 27.716.854.823

Nilai Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 adalah Rp.27.716.854.823 dan Rp.27.716.854.823. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	27,716,854,823
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	27,716,854,823
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(9,118,628,437)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	18,598,226,386

Tidak terdapat mutasi tambah dan Mutasi kurang dari gedung bangunan.

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 383.251.500

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 383.251.500 dan Rp. 479.245.200. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	479,245,200
Mutasi kurang:	(95,993,700)
Saldo per 31 Desember 2023	383,251,500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(108,999,792)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	274,251,708

Mutasi kurang pada aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dikarenakan adanya instalasi lain-lain yang dihentikan penggunaannya.

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp. 44.350.000

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah Rp. 44.350.000 dan Rp.48.772.240. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak, bahan kartografi dan barang bercorak kesenian dengan daftar barang terlampir. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	48,772,240
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	(4,422,240)
Saldo per 31 Desember 2023	44,350,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	44,350,000

Terdapat mutasi kurang aset tetap lainnya berasal dari bahan perpustakaan tercetak yang dihentikan penggunaannya.

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022 adalah masing-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp.21.860.216.709)

masing sebesar (Rp 21.860.216.709) dan (Rp.23.338.742.680) . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 adalah:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	14,603,554,894	12,632,588,480	1,970,966,414
2	Gedung dan Bangunan	27,716,854,823	9,118,628,437	18,598,226,386
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	383,251,500	108,999,792	274,251,708
4	Aset Tetap Lainnya	44,350,000	0	44,350,000
Akumulasi Penyusutan		42,748,011,217	21,860,216,709	20,887,794,508

C.10 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp.27.830.000,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) TA 2023 dan 2022 adalah Rp. 27.830.000,- dan Rp. 27.830.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	27,830,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	27,830,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(19,786,250)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	8,043,750

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang terkait aset tak berwujud pada TA 2023. Sedangkan senilai 27.830.000 merupakan *software* aplikasi berbasis *website* terkait perjalanan dinas dengan *website*: pd.kbjatim.id (NUP 3); layanan survey kepuasan masyarakat dengan *website*: survey.kbjatim.id, presensi untuk PPNPN dan satgas *stunting* dengan *website*: absen.kbjatim.id (NUP 4) ; *e-magazine* dengan *website*: online.pubhtml5.com (NUP 5).

Aset Lain-Lain
Rp.1.460.169.182

C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain TA 2023 dan 2022 adalah Rp. 1.460.169.182 dan Rp. 7.375.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada

dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7,375,000
Mutasi tambah:	4,245,502,132
Mutasi kurang:	(2,792,707,950)
Saldo per 31 Desember 2023	1,460,169,182
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1,453,875,542)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6,293,640

Adapun mutasi tambah berasal barang- barang yang dihentikan penggunaannya berupa alat angkutan darat bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kesehatan umum, komputer unit, peralatan komputer, instalasi lain-lain dan bahan perpustakaan tercetak. Sedangkan mutasi kurang berasal dari penghapusan beberapa barang yang telah dihentiguna.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp. 1.473.662.092)

C.12 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp 1.473.662.092) dan (Rp.20.996.250). Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya TA 2023 dan 2022

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	27,830,000	(19,786,250)	8,043,750
2	Aset Lain-lain	1,460,169,182	(1,453,875,842)	6,293,340
Akumulasi Penyusutan		1,487,999,182	(1,473,662,092)	14,337,090

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp.6.568.011.813

C.13 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2023 senilai Rp 6.568.011.813 Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Pada TA 2023, utang kepada pihak ketiga ini muncul dari transaksi akrual Bulan Desember 2023 yaitu Tunjangan Kinerja PNS senilai Rp 4.869.177.495 dan Tunjangan Kinerja PPPK senilai Rp 523.527.808, Uang Makan PNS senilai Rp 982.985.000, Uang Makan PPPK senilai Rp 150.603.000, Kekurangan gaji pangkat pengabdian PKB Jombang

berupa gaji pokok senilai Rp 161.600 dan pembulatan gaji senilai Rp 44 serta Tagihan pemakaian listrik senilai Rp 36.078.748, telepon senilai Rp 1.536.184 dan air senilai Rp 3.941.934 yang dibayarkan pada tahun 2024.

C.14 Ekuitas

Ekuitas

Rp.284.301.339.237

Ekuitas TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 284.301.339.237 dan Rp.254.294.111.920. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp. 18.792.331

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 18.792.331 dan Rp. 13.091.942.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	-	810,000	(100.00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	365,611.		
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	18,426,720.	12,281,942.	50.03
Jumlah	18,792,331	13,091,942	43.54

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah TA 2023 berasal dari denda keterlambatan penyelesaian Pengadaan Andalan IUD TCu 380A TA 2023 Mell E-Katalog Sesuai Kontrak No 2000/KEU.801/J.1/2023 Tgl 8 Feb 2023, BAST No 6243/KEU.801/J.1/2023 Tgl 12 Apr 2023.

Sedangkan pendapatan jasa giro berasal dari penyetoran pajak dan bunga Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) tahun 2022 dan 2023.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp. 259.737.197.849

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 259.737.197.849 dan Rp. 276.724.031.830. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	152,184,130,989	167,040,428,341	(8.89)
Beban Tunjangan Khusus PNS	95,963,211,078	104,818,740,010	(8.45)
Beban Gaji PPPK	7,021,974,115	2,988,322,160	
Beban Tunjangan Khusus PPPK	4,567,881,667	1,876,541,319	
Jumlah	259,737,197,849	276,724,031,830	(6.14)

Beban pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 6.14 persen bila dibandingkan TA 2022. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang purna tugas. Adapun rincian berdasarkan akun terinci pada tabel berikut:

Tabel Rincian Beban Gaji dan Tunjangan Menurut Akun TA 2023

Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	101,318,687,340.
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-1,659.
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,275,127.
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,099,838,546.
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-3,398,750.
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,376,298,410.
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	78,620,000.
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-23,220,000.
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-4,070,000.
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	22,011,363,000.
511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,454,894,215.
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-506,940.
511126	Beban Tunj. Beras PNS	4,181,168,700.
511129	Beban Uang Makan PNS	14,528,473,000.
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	165,450,000.
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-740,000.
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4,543,024,800.
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	69,473.
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	321,218,780.
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	88,265,422.
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	768,600,000.
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	307,205,640.
511628	Beban Uang Makan PPPK	993,590,000.
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan	-1,803,300.
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	95,965,014,378.
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4,567,881,667.
JUMLAH		259,737,197,849.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.236.607.653,- dan Rp. 362.073.340,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Beban Persediaan
Rp.236.607.653

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	236,607,653	362,073,340	(34.65)
Jumlah Beban Persediaan	236,607,653	362,073,340	(34.65)

Beban persediaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 34.56 persen dibandingkan TA 2022 seiring menurunnya pagu anggaran terkait belanja persediaan pada 2023.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp. 82.450.220.201*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 82.450.220.201 dan Rp. 88.146.106.616. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Terdapat penurunan sebesar 6.46 persen dibandingkan TA 2022. Hal itu dikarenakan pada TA 2023 terdapat penurunan beban jasa penanganan Covid-19, beban barang operasional dan non operasional penanganan Covid-19, beban barang operasional dan non operasional lainnya, beban pengiriman pengiriman surat pos, beban penambah daya tahan tubuh, beban langganan telepon, honor jasa profesi dan honor operasional satuan kerja.

Penurunan terkait beban penanganan covid 19 ini dikarenakan sejak Juni 2023 status pandemi telah dicabut. Selain itu pada surat DJPB Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 telah disampaikan bahwa akun khusus covid-19 tidak lagi digunakan mulai Semester II TA 2023. Sehingga realisasi yang masih terdapat pada laporan satker merupakan realisasi semester I. Sedangkan penurunan beban pengiriman surat pos dan telepon dikarenakan surat menyurat mayoritas telah dikirimkan secara online melalui aplikasi surat dan penggunaan telepon juga jarang digunakan karena komunikasi lebih sering menggunakan telepon seluler masing-masing.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
BEBAN BARANG			
Beban Keperluan Perkantoran	2,247,937,661.	2,047,034,012.	9.81
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		14,250,000.	(100.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,291,700.	8,535,500.	(73.15)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	343,684,000.	345,060,000.	(0.40)
Beban Barang Operasional Lainnya	9,225,000.	9,600,000.	(3.91)
Beban Barang Opr.- Penanganan pandemi Covid19	2,921,034.	2,932,539,590.	(99.90)
Beban Bahan	21,623,866,559.	18,140,083,066.	19.20
Beban Honor Output Kegiatan	223,050,000.	231,940,000.	(3.83)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	14,684,678,912.	27,860,728,360.	(47.29)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	269,125,000.	168,875,000.	59.36
Beban Barang Non Opr Penanganan Pandemi Covid19	187,479,944.	278,049,657.	(32.57)
BEBAN JASA			
Beban Langganan Listrik	477,579,074.	431,283,870.	10.73
Beban Langganan Telepon	18,815,148.	25,130,464.	(25.13)
Beban Langganan Air	48,060,102.	29,069,938.	65.33
Beban Langganan daya dan jasa lainnya	589,780,380.		
Beban Jasa Konsultan	56,564,000.	56,793,125.	
Beban Sewa	2,509,882,448.	2,094,578,800.	19.83
Beban Jasa Profesi	7,428,100,000.	8,106,625,000.	(8.37)
Beban Jasa Lainnya	31,727,179,239.	25,270,473,234.	25.55
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid19	0.	95,457,000.	(100.00)
Jumlah	82,450,220,201	88,146,106,616	(6.46)

Beban
Pemeliharaan
Rp. 1.876.310.654

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.876.310.654 dan Rp. 1.271.313.389. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	940,029,853	418,854,057	124.43
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	936,280,801	852,459,332	9.83
Jumlah	1,876,310,654	1,271,313,389	47.59

Terdapat kenaikan beban pemeliharaan sebesar 47.59 persen dibandingkan dengan TA 2022. Kenaikan tersebut berasal dari pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 124.43 persen salah satunya berupa pengecatan gedung. Sedangkan pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 9.83 persen yaitu dari pemeliharaan AC, printer maupun laptop.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 45.686.196.883

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 45.686.196.883 dan Rp. 48.298.413.292. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas TA 2023 mengalami penurunan sebesar 5.41 persen bila dibandingkan dengan TA 2022. Penurunan beban perjalanan dinas dikarenakan pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan dioptimalkan sesuai kebutuhan kegiatan pencapaian. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	7,187,752,488.	7,177,481,316.	0.14
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,803,823,000.	19,692,900,000.	-9.59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota	8,358,320,500.	12,046,092,850.	-30.61
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,336,300,895.	9,381,939,126.	31.49
Jumlah	45,686,196,883	48,298,413,292	-5.41

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp. 58.708.205.423

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.708.205.423 dan Rp. 39.049.742.219. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	58,708,205,423.	39,049,742,219.	50.34
Jumlah	58,708,205,423	39,049,742,219	50.34

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 50.34 persen bila dibandingkan dengan dengan TA 2022. Kenaikan ini berasal dari beban barang persediaan lainnya untuk diserahkan masyarakat berupa pengadaan alat obat kontrasepsi pada 2023 untuk memenuhi permintaan dari OPDKB terkait kebutuhan faskes serta untuk pelayanan KB di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Adapun contoh barangnya seperti IUD, Suntik, Kondom, Implant, Pil, dan Bahan Medis lainnya.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 2.731.942.821

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.731.942.821 dan Rp. 2.771.311.041. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,304,805,977.	1,345,457,795.	(3.02)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,409,326,956.	1,409,326,958.	(0.00)
Beban Penyusutan Jaringan	9,568,788.	9,568,788.	-
Beban Amortisasi Software	6,160,000.	6,957,500.	(11.46)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan	2,081,100		
Jumlah Penyusutan	2,731,942,821	2,771,311,041	(1.42)

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar 1.42 persen bila dibandingkan dengan TA 2022. Penurunan tersebut berasal dari beban amortisasi software dan beban penyusutan peralatan dan mesin juga mengalami penurunan seiring dengan turunnya nilai peralatan mesin.

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp 61.415)*

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp. 61.415) dan 99.132. Beban penyisihan ini berasal dari penyisihan piutang pengembalian tunjangan kinerja PKB Bulan Desember 2023 yang dibayar 2024. Selain itu juga dari penyisihan piutang atas kelebihan pembayaran pengadaan promosi KIE program bangga kencana dan penurunan stunting bersama mitra kepada masyarakat khusus TA 2022 yang dibayar 2024.

D.10 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.347.717.400*

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 347.717.400 dan Rp. (Rp 183.523.537). Surplus kegiatan non operasional ini merupakan akumulasi pendapatan pelepasan aset non lancar, pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

Adapun pendapatan pelepasan aset non lancar berasal dari pemindahtanganan BMN lainnya senilai Rp 500.712.664 berupa hasil lelang 1 paket barang inventaris kantor yang rusak berat, 5 mobil dan 1 bus. Pendapatan penyesuaian nilai persediaan senilai Rp 80.340.000 terbentuk dari adanya koreksi tambah 20.000 siklus pil progectin @Rp 4.017 dikarenakan ada kesalahan catat di SAKTI. Seharusnya pada SBBK 104/A/2023 tertulis pil progectin keluar hanya 12.000 siklus dan pil kombinasi keluar 20.000 siklus. Namun di SAKTI salah catat pil progectin 32.000 siklus, sehingga harus dikoreksi untuk mengembalikan saldo 20.000 siklus pil progectin tersebut. Selain itu pendapatan dari kegiatan non operasional juga berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran yang Lalu. Sedangkan beban kegiatan non operasional merupakan barang persediaan usang senilai Rp 309.387.958 berupa 14.672 stera syringe 10cc senilai total Rp 12.838.000, sebanyak 42.626 cagut chromic senilai total Rp 237.657.558 dan sebanyak 38.950 syringe 5 cc senilai total Rp 58.892.400.

D.11 Surplus/ Defisit LO

*Surplus/Defisit LO
(Rp
451.060.110.338)*

Surplus/ (defisit) LO merupakan penjumlahan dari surplus/(defisit) kegiatan operasional dan non operasional. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengalami Defisit LO TA 2023 dan 2022 yaitu (Rp 451.060.110.338) dan (Rp 456.793.522.454).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.254.294.111.920

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 254.294.111.920 dan Rp. 106.276.663.022.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO

(Rp

451.060.110.338)

Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp. 451.060.110.338) dan (Rp. 456.793.522.454). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi

(Rp 5.000)

Koreksi yang Menambah Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp.5.000) dan Rp 157.747.980.000. Koreksi pada periode yang berakhir pada 30 Desember 2023 senilai (Rp 5.000) dikarenakan adanya penghapusan BMN berupa laporan dengan NUP 50 yang telah di henti guna sebelum pengimplementasian aplikasi sakti (sebelum 2022).

E.4 Lain- lain

Lain- lain

Rp 5.630.800

Nilai lain- lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 5.630.800 dan Rp 17.128.166. Nilai lain- lain tersebut berasal dari koreksi lainnya terkait Jurnal atas pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan promosi KIE program bangga kencana dan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat khusus TA 2022 yang dibayar pada Januari 2024.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar

Entitas

Rp.481.061.711.855

Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 481.061.711.855 dan Rp. 447.045.863.186. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain (313111)	493,626,888,062
Diterima dari Entitas Lain (313121)	(617,496,047)
Transfer Keluar (313211)	(12,080,566,660)
Transfer Masuk (313221)	132,886,500
Jumlah	481,061,711,855

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp.617.496.047) sedangkan DKEL Rp.493.626.888.062.

2. Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 132.886.500. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 12.080.566.660,-).

Ekuitas Akhir
Rp.284.301.339.237

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 284.301.339.237 dan Rp. 254.294.111.920.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 21 Juni 2023 Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut status pandemi di Indonesia, dengan pencabutan tersebut Indonesia memasuki masa endemi. Hal tersebut berpengaruh pada anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada satuan kerja. Dengan dicabutnya status pandemi, artinya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah ditiadakan, sehingga kegiatan virtual mulai dilakukan secara klasikal atau pertemuan langsung. Perjalanan antarkota, provinsi juga sudah tidak dibatasi sehingga perjalanan dinas mulai dioptimalkan kembali demi mendukung percepatan pencapaian program.

F.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah Rekening Bendahara pada PT Bank Negara Indonesia 9898320180301000 a.n. BPG 031 PERWAKILAN BKKBN PROV JATIM, Jalan Airlangga No. 31 – 33 Surabaya. Selain itu terdapat rekening RPL 031 BKKBN JTM DATA PENDATAAN.

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 39/KP.05.01/PEG/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021, maka diperintahkan:

Kepala Perwakilan : Dra. Maria Ernawati, MM

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

- Nomor: 18131/KU.01/J.1/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran : Dra. Maria Ernawati, MM

Pejabat Pembuat Komitmen :

1. Nyigit Wudi Amini, S.Sos, M.Sc
2. Heny Tria Wahyuning Diah, SE, MA
3. dr. Sofyan Rizalanda, M.Kes

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Bertha Ratri Rahayani, S.KM

Bendahara Pengeluaran : Dwi Rahayu, SE

LAMPIRAN

Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2023 *Audited*



Jalan Airlangga No. 31 – 33
Surabaya 60017



DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 018030

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)				GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action		
								Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini											S.d Bulan Ini	
													RVRO	PCRO (%)										RVRO	PCRO (%)
1	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QDE001	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	7,885,606,000	7,742,724,787	98.19	1,474,500	Keluarga	114,070.00	6.00	1,474,500.0000	100.00	1.81	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
2	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	FBA002	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	772,100,000	765,311,353	99.12	14	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0.00	0.53	14.0000	100.00	0.88	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
3	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QDD001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	3,012,887,000	2,994,604,280	99.39	4,116	KelompokMasyarakat	83.00	5.00	4,116.0000	100.00	0.61	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
4	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QDD002	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	2,100,000,000	2,080,739,624	99.08	1,360	KelompokMasyarakat	0.00	1.00	1,360.0000	100.00	0.92	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
5	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	5297	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	215,054,000	211,589,362	98.39	1	Layanan	0.00	8.37	1.0000	100.00	1.61	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

6	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QDD005	Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting	5,495,644,000	5,473,750,755	99.60	12,895	Kelompok Masyarakat	258.00	5.00	12,895.0000	100.00	0.40	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
7	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QDC001	Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan stunting	1,304,000,000	1,301,886,050	99.84	302,093	Orang	27,317.00	3.00	306,923.0000	100.00	0.16	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
8	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	UBA002	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	1,862,500,000	1,860,229,565	99.88	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0.00	0.35	38.0000	100.00	0.12	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
9	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	DCJ001	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangsa Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	360,143,000	359,123,978	99.72	453	Orang	0.00	0.00	1,082.0000	100.00	0.28	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%			11-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
10	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	UBA004	Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota	1,575,600,000	1,573,135,243	99.84	38	Kab/Kota	5.00	0.30	38.0000	100.00	0.16	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
11	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	5297	CAN001	Pengadaan sarana dan prasana TIK Provinsi	252,670,000	251,937,265	99.71	4	Unit	0.00	0.29	4.0000	100.00	0.29	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
12	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	5297	EBA994	Layanan Perkantoran	272,299,001,000	270,871,488,389	99.48	1	Layanan	0.00	8.37	1.0000	100.00	0.52	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

13	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QMB001	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	27,060,000,000	25,566,218,338	94.48	3	layanan	0.00	1.00	3.0000	100.00	5.52	01	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
14	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	SCM001	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	28,154,637,000	28,131,834,490	99.92	93,809	Orang	0.00	0.00	94,712.0000	100.00	0.08	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	11-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
15	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QDB001	Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI	805,111,000	761,282,000	94.56	2,166	Lembaga	0.00	1.00	2,166.0000	100.00	5.44	01	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
16	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QMA001	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	17,202,247,000	17,198,242,530	99.98	1	layanan	0.00	0.39	1.0000	100.00	0.02	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
17	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	PEA001	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6,379,990,000	6,333,467,699	99.27	39	kegiatan	1.00	5.00	39.0000	100.00	0.73	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
18	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QEI001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokasi)	100,522,558,000	100,466,419,972	99.94	2,166	Lembaga	0.00	0.23	2,166.0000	100.00	0.06	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
19	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	UBA005	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan	737,200,000	722,236,529	97.97	38	Kab/Kota	0.00	1.00	38.0000	100.00	2.03	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

20	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	BDB001	Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	874,177,000	862,551,076	98.67	2,166	Lembaga	0.00	1.00	2,166.0000	100.00	1.33	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
21	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	5297	PEA001	Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	1,865,990,000	1,795,831,260	96.24	1	kegiatan	0.00	1.00	1.0000	100.00	3.76	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
22	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QDD006	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB	2,661,358,000	2,660,565,382	99.97	278	KelompokMasyarakat	0.00	1.00	278.0000	100.00	0.03	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
23	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	PEA002	Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota pada 12 Provinsi prioritas	1,881,000,000	1,841,963,506	97.92	38	kegiatan	2.00	5.00	38.0000	100.00	2.08	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
24	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	UBA001	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	1,231,000,000	1,229,120,829	99.85	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0.00	0.51	38.0000	100.00	0.15	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
25	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QMA002	Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting	381,805,000	375,505,500	98.35	1	layanan	0.00	1.00	1.0000	100.00	1.65	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
26	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	PBG001	Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	150,000,000	149,394,000	99.60	2	RekomendasiKebijakan	0.00	0.40	2.0000	100.00	0.40	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

27	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	FBA001	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	405,180,000	373,982,057	92.30	38	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0.00	1.00	38.0000	100.00	7.70	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%			03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
28	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QDD004	Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1,034,146,000	1,029,531,646	99.55	38	KelompokMasyarakat	0.00	0.60	38.0000	100.00	0.45	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
29	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	FBA003	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitas pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga	484,077,000	482,597,825	99.69	1	Daerah(Prov/Kab/Kota)	0.00	1.00	1.0000	100.00	0.31	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
30	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	UBA003	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitas pengembangan DASHAT di Kampung KB pada 12 provinsi prioritas	926,800,000	922,871,456	99.58	38	Kab/Kota	0.00	0.53	38.0000	100.00	0.42	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
31	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	5297	EBD965	Layanan Audit Internal	51,454,000	51,383,500	99.86	1	Dokumen	0.00	0.14	1.0000	100.00	0.14	00	Non PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
32	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	5297	QAH001	Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	131,250,000	125,771,400	95.83	1	layanan	0.00	1.00	1.0000	100.00	4.17	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
33	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	UAE001	Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTTPS SATGAS percepatan penurunan stunting provinsi kab/kota	200,000,000	199,015,251	99.51	1	Laporan	0.00	1.00	1.0000	100.00	0.49	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%			03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

34	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	5297	QIF001	Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	62,940,000	62,849,926	99.86	1	Layanan	0.00	0.14	1.0000	100.00	0.14	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
35	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	QMA003	verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi	2,935,711,000	2,924,799,901	99.63	1	layanan	0.00	1.00	1.0000	100.00	0.37	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	03-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan
36	018030	PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	06801	12	3331	SCM002	Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan stunting	3,931,235,000	3,906,671,987	99.38	1,995	Orang	0.00	0.00	2,002.0000	100.00	0.62	00	PN	S/d Desember Capaian Output 100%	02-JAN-24	11-JAN-24	Lihat catatan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 068

ESELON I : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 01

SATUAN KERJA : PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR 018030

Tgl Data : 03/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/24 11:44 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	497,205,071,000	493,626,888,062	(3,578,182,938)	99	448,601,310,000	438,713,328,151	(9,887,981,849)	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Surabaya, 3 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa



DRA. MARIA ERNAWATI, MM.

196602111992032001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 03/05/24 11:40 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	9,655,435	21,938,358	(12,282,923)	(55.99)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(48,277)	(109,692)	61,415	(55.99)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	9,607,158	21,828,666	(12,221,508)	(55.99)
Persediaan	38,882,660,294	9,235,609,959	29,647,050,335	321.01
JUMLAH ASET LANCAR	38,892,267,452	9,257,438,625	29,634,828,827	320.12
ASET TETAP				
Tanah	231,074,952,000	231,074,952,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	14,603,554,894	18,461,803,821	(3,858,248,927)	(20.90)
Gedung dan Bangunan	27,716,854,823	27,716,854,823	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	383,251,500	479,245,200	(95,993,700)	(20.03)
Aset Tetap Lainnya	44,350,000	48,772,240	(4,422,240)	(9.07)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(21,860,216,709)	(23,338,742,680)	1,478,525,971	(6.34)
JUMLAH ASET TETAP	251,962,746,508	254,442,885,404	(2,480,138,896)	(0.97)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	27,830,000	27,830,000	0	0.00
Aset Lain-lain	1,460,169,182	7,375,000	1,452,794,182	19,698.90
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,473,662,092)	(20,996,250)	(1,452,665,842)	6,918.69
JUMLAH ASET LAINNYA	14,337,090	14,208,750	128,340	0.90
JUMLAH ASET	290,869,351,050	263,714,532,779	27,154,818,271	10.30
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6,568,011,813	9,420,420,859	(2,852,409,046)	(30.28)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,568,011,813	9,420,420,859	(2,852,409,046)	(30.28)
JUMLAH KEWAJIBAN	6,568,011,813	9,420,420,859	(2,852,409,046)	(30.28)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	284,301,339,237	254,294,111,920	30,007,227,317	11.80
JUMLAH EKUITAS	284,301,339,237	254,294,111,920	30,007,227,317	11.80
JUMLAH EKUITAS	284,301,339,237	254,294,111,920	30,007,227,317	11.80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	290,869,351,050	263,714,532,779	27,154,818,271	10.30

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

**SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR**

Tgl Data : 03/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 03/05/24 11:40 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

FINAL

Surabaya, 3 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa



DRA. MARIA ERNAWATI, MM.

196602111992032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/24 11:32 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	9,655,435	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	48,277
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	38,882,660,294	0
0.0	131111	Tanah	231,074,952,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,603,554,894	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	27,716,854,823	0
0.0	134113	Jaringan	383,251,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	44,350,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	12,632,588,480
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	9,118,628,437
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	108,999,792
0.0	162151	Software	27,830,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,460,169,182	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,453,875,842
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	19,786,250
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	6,526,454,947
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	41,556,866
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	493,626,888,062
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	617,496,047	0
0.0	313211	Transfer Keluar	12,080,566,660	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	132,886,500
0.0	391111	Ekuitas	0	254,294,111,920
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5,000	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	5,630,800
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	500,712,664
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	365,611
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	18,426,720
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	76,052,694
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	80,340,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	101,318,687,340	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,273,468	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,096,439,796	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,376,298,410	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	55,400,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	22,007,293,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,454,894,215	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	4,180,661,760	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/24 11:32 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	14,528,473,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	164,710,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4,543,024,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	69,473	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	321,218,780	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	88,265,422	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	768,600,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	307,205,640	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	993,590,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	95,963,211,078	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4,567,881,667	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,247,937,661	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,291,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	343,684,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	9,225,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,921,034	0
3.0	521211	Beban Bahan	21,623,866,559	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	223,050,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	14,684,678,912	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	269,125,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	187,479,944	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	477,579,074	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	18,815,148	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	48,060,102	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	589,780,380	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	56,564,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,509,882,448	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,428,100,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	31,727,179,239	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	940,029,853	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	936,280,801	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7,187,752,488	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,803,823,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,358,320,500	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,336,300,895	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,304,805,977	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,409,326,956	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	9,568,788	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/24 11:32 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	6,160,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,081,100	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	236,607,653	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	58,708,205,423	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	61,415
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	309,387,958	0
JUMLAH			778,637,415,277	778,637,415,277

Keterangan :

FINAL

Surabaya, 3 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa



DRA. MARIA ERNAWATI, MM.

196602111992032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 03/05/24 2:20 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	493,626,888,062
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	617,496,047	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	500,712,664
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	365,611
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	18,426,720
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	97,991,052
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	101,322,065,740	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,276,363	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,100,192,546	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,376,440,010	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	78,620,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	22,011,363,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,454,922,315	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	4,181,168,700	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	14,913,669,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	165,450,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	4,543,024,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	69,473	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	321,218,780	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	88,265,422	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	768,600,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	307,205,640	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	900,204,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	98,814,220,456	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4,280,892,960	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,247,937,661	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,291,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	343,684,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,225,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,921,034	0
3.0	521211	Belanja Bahan	21,623,866,559	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	223,050,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14,684,678,912	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	269,125,000	0
3.0	521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	383,070,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	187,479,944	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	212,654,100	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	476,924,923	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 03/05/24 2:20 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	18,944,138	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	47,088,237	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	589,780,380	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	56,564,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,509,882,448	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,428,100,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	31,727,179,239	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	940,029,853	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	936,280,801	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,187,752,488	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,803,823,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,358,320,500	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,336,300,895	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	100,172,867,429	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251,937,265	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,659
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,398,750
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	23,220,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	4,070,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	506,940
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1,803,300
JUMLAH			494,278,124,758	494,278,124,758

Keterangan :

FINAL

Surabaya, 3 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa



DRA. MARIA ERNAWATI, MM.

196602111992032001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 03/05/24 11:40 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,792,331	13,091,942	5,700,389	43.541
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,792,331	13,091,942	5,700,389	43.541
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	18,792,331	13,091,942	5,700,389	43.541
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	259,737,197,849	276,724,031,830	(16,986,833,981)	(6.139)
Beban Persediaan	236,607,653	362,073,340	(125,465,687)	(34.652)
Beban Barang dan Jasa	82,450,220,201	88,146,106,616	(5,695,886,415)	(6.462)
Beban Pemeliharaan	1,876,310,654	1,271,313,389	604,997,265	47.588
Beban Perjalanan Dinas	45,686,196,883	48,298,413,292	(2,612,216,409)	(5.408)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	58,708,205,423	39,049,742,219	19,658,463,204	50.342
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 03/05/24 11:40 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,731,942,821	2,771,311,041	(39,368,220)	(1.421)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(61,415)	99,132	(160,547)	(161.953)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	451,426,620,069	456,623,090,859	(5,196,470,790)	(1.138)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(451,407,827,738)	(456,609,998,917)	5,202,171,179	(1.139)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	500,712,664	(15,673,741)	516,386,405	(3,294.596)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	500,712,664	6,578,999	494,133,665	7,510.773
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	22,252,740	(22,252,740)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(152,995,264)	(167,849,796)	14,854,532	(8.85)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	156,392,694	86,625,924	69,766,770	80.538
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	309,387,958	254,475,720	54,912,238	21.579
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	347,717,400	(183,523,537)	531,240,937	(289.467)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(451,060,110,338)	(456,793,522,454)	5,733,412,116	(1.255)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(451,060,110,338)	(456,793,522,454)	5,733,412,116	(1.255)

Keterangan :

FINAL

Surabaya, 3 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa



DRA. MARIA ERNAWATI, MM.

196602111992032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (068) BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (018030) PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA
TIMUR

Tgl Data : 03/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 03/05/24 11:41 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	254,294,111,920	106,276,663,022	148,017,448,898	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(451,060,110,338)	(456,793,522,454)	5,733,412,116	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	5,625,800	157,765,108,166	(157,759,482,366)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(5,000)	157,747,980,000	(157,747,985,000)	-
LAIN-LAIN	5,630,800	17,128,166	(11,497,366)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	481,061,711,855	447,045,863,186	34,015,848,669	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	30,007,227,317	148,017,448,898	(118,010,221,581)	-
EKUITAS AKHIR	284,301,339,237	254,294,111,920	30,007,227,317	-

Keterangan :

FINAL

Surabaya, 3 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa



DRA. MARIA ERNAWATI, MM.

196602111992032001